

Daftar Bacaan

Buku

- Ali, Chaidir, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Amrullah, Arief M., *Politik Hukum Pidana dalam rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.
- Aninda S Wirjasaputra dan Alexis Riafel *Government Owned Enterprise in Indonesia*" USAID Parer, 1972.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*", Putra Abardin, Jakarta, 1996.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986
- Freidmann, W. *Governmental (Public) Enterprise*, tanpa penerbitan.
- Ibrahim, R. *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta 1981
- Nizar Suhendra, dkk, *Pengadilan Khusus Korupsi*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK), 2002.
- Philipus M. Hadjon dan R. Djoko Soemadijo, "*Hukum Tata Negara dan Pembangunan Ekonomi*," Makalah Seminar Fakultas Hukum se-Jawa dan Bali tentang Perkembangan Peranan Pendidikan Ilmu Hukum Tata Negara Dalam Prospek Kehidupan Sosial dan Pemerintahan Indonesia. di Universitas Jember 26-27 Februari 1986.
- Prakoso, Djoko, Bambang Riady Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Prakoso, Djoko & Ayu Suryati, *Upetisme Ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 1971*, Bina Aksara, 1986.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.
- Projohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Purnomo, Bambang, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*", Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- , *Pola dasar Teori-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Singgih, *Dunia pun Memerangi Korupsi*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2002.

Sudarmin, *Pedoman Tentang Pemeriksaan Kas Dan Barang Negara*, CV. Genep Jaya, Jakarta, 1982.

Wantjik Saleh, K, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Media Massa

Hukumonline, edisi 6 agustus 2002
"Optimalisasi peran hukum dalam restrukturisasi utang Perusahaan."

Indriyanto Seno Adji, "KPK dan Korupsi," dalam Kompas Cyber Media, edisi 6 Januari 2003.

Jawa Pos edisi rabu 26 Februari 2003, "Negara Dirugikan Rp69,3 T."

Kompas Cyber Media, "Hakim Jangan Terfokus pada Instrumen Hukum Normatif," edisi Rabu, 25 Juni 2003.

Kompas Cyber Media, "Pengadilan Khusus Korupsi Akan Timbulkan Fragmentasi," edisi 2 Agustus 2002.

Kompas Cyber Media, *Jaksa Berwenang Menyidik Korupsi* Huzrin Hood, edisi, 2 September 2003.

Kompas Cyber Media: Masyarakat Transparansi Indonesia Online, "Periksa dulu SP3 kemudian," dalam edisi Kamis, 03 Juli 2003, Masyarakat Transparansi Indonesia Online, "UU KPTPK Dapat Timbulkan Masalah," Media Indonesia edisi Selasa, 14 Januari 2003.

Media online Komisi Hukum Nasional, 18 Maret 2003, "Meningkatkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu"

Media Transparansi Indonesia edisi 4 Januari 1999.

-----, edisi, 14 Mei 2002 dikutip dari Transparency International "Ranking Korupsi menurut Negara: Survei 2001"

Republika, "SP3 Bola Api yang Tak Pernah Padam," Senin, 8 September 2003,

Suara Merdeka, "SP3 TEXMACO Konspirasi Kelas Tinggi," edisi Sabtu, 13 Juli 2002

Tempo interaktif, "Indonesia Negara Terkorup Kelima," Rabu, 20 Oktober 2004

Tumpal Wagner Sitorus, "Hak BUMN untuk Menerima Pembagian Rugi Bersih," Selasa, 05 April 2005, Republik online.